



Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Program Bedah Rumah Warga Miskin di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu

Slamet Riadi

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

ARTIKEL INFO

* Corresponding author;
riadislamet45@yahoo.co.id

Keywords:

bedah rumah;
masyarakat;
partisipasi;
PNPM mandiri;

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat terhadap program bedah rumah warga miskin dalam program pemerintah yang disinergikan dengan PNPM Mandiri melalui BKM yang mengawasi UPL. Tujuan utama dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menggambarkan situasi atau objek secara sistematis, karakteristik, akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data berasal dari wawancara, observasi, dan studi literature yang dianalisis secara induktif. Ada empat indikator/tahap yang menjadi landasan penelitian ini yaitu tahap *assessment*, tahap alternative program, tahap implementasi program dan tahap evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Silae masih tergolong rendah. Hal ini berdasarkan pada tiga dari empat indikator yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dinilai masih belum maksimal. Peneliti menemukan bahwa masyarakat di Kelurahan Silae masih banyak berpartisipasi pada tahap implementasi program.

This paper examines community participation in the house renovation program for the poor in government programs in synergy with PNPM Mandiri through the BKM that oversees UPL. The main objective in conducting this research is to describe the situation or object systematically, characteristic, accurately, precisely, and according to actual events. The research method used is qualitative research with data collection derived from interviews, observations, and literature studies that were analyzed inductively. There are four indicators/stages that form the basis of this research, namely the assessment stage, the alternative program stage, the program implementation stage, and the evaluation stage. The results showed that community participation in Silae was still low. This is based on three of the four indicators used as a reference in this study which are considered not optimal. Researchers found that many people in the Silae Village still participate in the program implementation stage.

PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan.

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus- menerus

dan dicarikan solusinya. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan menjadi persoalan masyarakat, akan tetapi juga karena gejala kemiskinan semakin meningkat sejalan dengan terjadinya krisis multidimensional yang dihadapi oleh Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. kemiskinan yang ada di Indonesia

merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara, tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju (Hidayat, 2020)

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan (Andika Rismayanti Hadi, Irwan Effendi, 2013). Program ini digagas untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. (Pedoman Umum PNPM, 2007).

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya.

Pembangunan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan, hasil-hasilnya serta secara langsung menyentuh kepentingan sebagian besar masyarakat yang ada di pelosok daerah di negara ini (Samosir, 2020). Pembangunan ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Istilah kerja sama antar pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat diartikan sebagai collaborative governance (Daswati, Samad, & Wekke, 2019).

PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/ sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat kedalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015.

Program PNPM Mandiri Perkotaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) disebut PNPM MP adalah suatu program

penanggulangan kemiskinan sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan didaerahnya (Nugroho, Ft, & Surabaya, 2013). Program PNPM Mandiri Perkotaan dianggap tepat untuk menjadikan masyarakat yang mandiri melalui penyertaan masyarakat di dalamnya dan mengatasi kemiskinan di perkotaan.

PNPM Mandiri Perkotaan juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja masyarakat. Produktivitas kerja masyarakat yang dimaksud adalah suatu kemampuan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan suatu produk atau hasil kerja sesuai dengan mutu yang ditetapkan dalam waktu yang lebih singkat sehingga senantiasa berkarya lebih dari apa yang telah dan sedang diusahakan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dari suatu usaha. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kinerja adalah pendidikan, keterampilan, sikap dan etika kerja, tingkat penghasilan, jaminan sosial, tingkat sosial dan iklim kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, hubungan individu, teknologi, dan produksi (Mahendra, 2017).

Konsep produktivitas erat hubungannya dengan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Atinya apabila produktivitas naik hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu, bahan, tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan tenaga kerja. Dengan meningkatnya produktivitas kerja masyarakat, pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Hal itu karena produktivitas kerja masyarakat akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Mahendra, 2017).

Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dengan cara yang berbeda-beda dalam program ini. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai sebuah lembaga kepemimpinan kolektif dan berperan sebagai representasi warga dengan proses pemilihan langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun. BKM sifatnya sukarela, setiap kelurahan memiliki BKM sebagai representasi kelurahan mewakili warga di lingkup kelurahan tersebut agar kebutuhan kelurahan yang terwakilkan dapat diaspirasikan kepada pemerintah daerah dan daerah yang terwakilkan itu dapat menikmati pembangunan yang dibutuhkan.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) memiliki tujuan mengawasi Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dalam program bedah rumah yang di dani langsung oleh Kemenpera. Program ini sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mengentaskan rumah tidak layak huni. Pada tahun 2011 lalu, Kemenpera hanya mendapat target 40 ribu rumah masyarakat miskin yang dibedah. Pada tahun 2012, target pembangunan bertambah lebih dari 600% tepatnya 250 ribu rumah. Bahkan pada Tahun 2013 ditambah lagi 500 ribu rumah. Tahun 2014 500 ribu rumah. (<https://kemenperaindonesia.com/> [diakses pada tanggal 19 Desember 2014]).

Kelurahan Silae sebagai salah satu Kelurahan yang menjadi sasaran program bedah rumah warga

miskin dari Kemenpera melalui PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan oleh UPL dibawah pengawasan BKM Mosangu Kelurahan Silae atas bentuk PNPM Mandiri Perkotaan. Pada tahun 2014 telah dibedah rumah warga miskin sebanyak 17 unit rumah. Pelaksanaan program bedah rumah miskin dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama yaitu 60% dalam proses pengerjaannya dan tahap ke kedua atau finishing 40% pengerjaannya dilaksanakan pada bulan September 2014. Dengan memakan anggaran sebesar Rp.120.000.000, Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya jumlah rumah tidak layak huni di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi sebagai bagian dari wilayah Otoritas Kota Palu.

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Tjokroamidjojo (1995:8) menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan: (1) proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; (2) Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil; (3) Proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu (Daraba, 2017).

Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1994) yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting: (i) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, (ii) Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut, dan (iii) mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan (Daraba, 2017).

Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program-program dalam pembangunan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dapat dipastikan pula, bahwa tujuan pembangunan akan tercapai pula (Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, 2019). Pendeknya, dengan pendekatan partisipatif diharapkan

dapat berkembangnya aktivitas yang berorientasi pada kompetensi dan tanggung jawab sosial sebagai anggota komunitas itu sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses, maka keterampilan analisis dan perencanaan menjadi teralihkan kepada mereka atau partisipan (Yunita, Herma, 2020)

Oleh karena itu dibutuhkan pula dukungan serta keterlibatan dari masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Silae atas partisipasinya pada program bedah rumah warga miskin tersebut, sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis mencoba mengadakan suatu penelitian tentang "**Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Program Bedah Rumah Warga Miskin Di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu**".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Ada empat indikator yang akan diujikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Tahap Assesment*. Masyarakat Kelurahan silae turut serta dalam mengidentifikasi atau melihat permasalahan yang ada, serta merasakan permasalahan kemiskinan yang ada pada lingkungannya.
2. Tahap Alternatif Program atau Kegiatan. Masyarakat Kelurahan Silae ikut merumuskan pemecahan masalah (mencari jalan keluar dari masalah) dalam program bedah rumah miskin di lingkungannya, melalui rapat bersama para aparat kelurahan beserta panitia pelaksana program bedah rumah warga miskin tersebut.
3. Tahap pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan. Masyarakat Kelurahan Silae ikut berpartisipasi dalam pengerjaan program tersebut, artinya mereka bergotong royong dalam membantu pelaksanaan pembedahan rumah miskin tersebut.
4. Tahap Evaluasi. Masyarakat Kelurahan Silae ikut mengawasi segala bentuk hasil dari program bedah rumah warga miskin tersebut, melalui rapat evaluasi bersama para aparat kelurahan beserta panitia pelaksana program bedah rumah tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

Sebenarnya pada dasarnya organisasi tidak hanya mengandalkan SDM yang memiliki keterampilan kerja dan kecakapan yang mumpuni, tetapi yang menjadi poin paling penting adalah mereka memiliki keinginan yang kuat dan mau bekerja dengan giat untuk mencapai sebuah hasil kerja yang sesuai dengan tujuan dari organisasi/instansi (Alfian, Niswaty, Darwis, Arhas, & Salam, 2019). Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrumen yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati manfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah (Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, 2019).

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah bentuk kemauan bagi warga negara untuk ikut ambil bagian atau memberikan kontribusi dalam berbagai kegiatan, program maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang berbagai program maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Keterlibatan masyarakat dalam mengambil bagian pada setiap program atau kebijakan pemerintah merupakan sebuah nilai yang begitu penting dan menjadi kunci sukses dalam berbagai kegiatan pembangunan yang tengah di programkan pemerintah.

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat akan cenderung memarginalkan masyarakat itu sendiri. Namun pada kenyataannya sering terjadi pengabaian partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat masih menjadi objek dari pelaksanaan pembangunan (Sidiq, Ade Jafar, 2017).

Program Bedah Rumah Warga Miskin Merupakan sebuah program yang tentunya memiliki tujuan untuk membantu warga miskin memiliki rumah yang layak huni serta nantinya secara perlahan akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin tersebut ketingkat perekonomian yang lebih baik. Dalam program pemerintah yang disinergiskan dengan PNPM Mandiri melalui BKM yang mengawasi UPL ini, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena keikutsertaan masyarakat dalam program ini merupakan sebuah gambaran tentang adanya sifat gotong royong dan kepedulian terhadap berbagai masalah kemiskinan yang ada dilingkungannya.

Seperti halnya Kelurahan Silae, sebagai kelurahan yang turut menjadi salah satu pelaksanaan program Bedah Rumah Warga Miskin sangat membutuhkan dukungan berupa partisipasi dari masyarakat dalam berbagai tahapan program tersebut, diantaranya yaitu melihat permasalahan kemiskinan serta merasakan masalah kemiskinan yang ada dilingkungannya, ikut turut terlibat dalam mencari solusi yang nantinya menjadi jalan keluar atas permasalahan kemiskinan yang ada dilingkungannya, masyarakat ikut terlibat dalam pengerjaan program dan ikut mengawasi atau mengevaluasi berbagai hasil yang tengah dicapai program Bedah Rumah Warga Miskin

tersebut. Untuk itu, pada bab ini peneliti mencoba untuk menguraikan hasil penelitian yang berkaitan tentang partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program Bedah Rumah Warga Miskin di Kelurahan Silae melalui proses wawancara dengan mengacu pada beberapa indikator.

a) Tahap Assesment

Tahap *assesment* merupakan proses pengidentifikasian permasalahan yang ada disekitar lingkungan masyarakat sebelum mengajukan beberapa program yang perlu dijadikan solusi atas permasalahan yang telah ditemukan tersebut. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa masyarakat Kelurahan Silae dinilai masih kurang berpartisipasi atau terlibat dalam tahap *assesment*, hal ini berdasarkan pada beberapa tanggapan para informan yang menyatakan bahwa masyarakat belum banyak terlibat dalam tahapan pengidentifikasian permasalahan adanya rumah masyarakat miskin yang kurang layak huni di Kelurahan Silae. Padahal keterlibatan masyarakat untuk turut serta membantu dalam mengidentifikasi beberapa rumah warga miskin sangat diperlukan dan dapat membantu dalam memberikan beberapa data rumah masyarakat miskin yang perlu diberikan bantuan bedah rumah, karena masyarakat lebih mengetahui tentang kondisi masyarakat miskin di sekitarnya, sehingga partisipasi masyarakat dalam tahap ini sangat membantu.

b) Tahap Alternatif Program atau Kegiatan

Tahap alternatif program atau kegiatan merupakan sebuah tahapan dimana masyarakat ikut terlibat secara langsung dalam memikirkan atau mencari solusi atas permasalahan yang telah ditemukan saat tahap *assesment*. Dalam program Bedah Rumah Warga Miskin di Kelurahan Silae, bentuk partisipasi masyarakat pada tahapan ini adalah ikut dalam penentuan prioritas masyarakat mana yang perlu diberikan bantuan bedah rumah. Pada tahap ini hasil penelitian menggambarkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat Kelurahan Silae untuk ikut terlibat menentukan prioritas kelompok sasaran yang akan diberikan bantuan, hal ini berdasarkan beberapa penuturan informan yang mengatakan masyarakat masih kurang terlibat dalam kegiatan musyawarah untuk menentukan atau memprioritaskan kelompok masyarakat miskin mana yang perlu diberikan bantuan. Padahal keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses atau tahapan program bedah rumah warga miskin merupakan salah satu aspek yang sangat penting, karena masyarakat juga dapat membantu seluruh pihak yang terkait dalam program tersebut dengan memberikan ide-ide ataupun saran-saran mereka yang dapat mempermudah para aparatur maupun pihak BKM yang ada di Kelurahan Silae untuk memilih atau memprioritaskan kelompok masyarakat yang perlu diberikan bantuan.

c) Tahap Implementasi Program

Tahap pelaksanaan atau implementasi merupakan inti dari sebuah program yang sebelumnya telah direncanakan dan dirancang sedemikian rupa. Pada tahapan ini program sudah dilaksanakan atau diimplementasikan kepada objek atau sasaran program tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Silae pada tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan dinilai sudah baik, masyarakat secara swadaya bergotong royong mengerjakan rumah warga miskin yang telah dibedah. Hal ini juga dikarenakan minimnya dana bantuan yang diberikan yang hanya sebatas untuk membeli keperluan bahan bangunan untuk rumah yang dibedah tersebut. Jadi disinilah pentingnya semangat saling peduli antar masyarakat karena dewasa ini sudah sangat jarang sifat gotong royong ada di tengah masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di perkotaan yang pada umumnya memiliki sikap individual.

d) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dalam sebuah program atau kegiatan, tahap evaluasi dapat menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan program-program serupa kedepannya, karena tahap evaluasi merupakan tahap menilai apakah sebuah program berjalan dengan baik atau berdampak baik bagi masyarakat sebagai sasaran program atau justru kurang berjalan dengan baik dan kurang berdampak baik kepada masyarakat sasaran program tersebut. Hasil penelitian menggambarkan bahwa masih kurangnya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi program bedah rumah tersebut. Tahap evaluasi merupakan salah satu tahap yang penting untuk dilaksanakan, karena tahap evaluasi merupakan tahap menilai dan melihat apakah program bedah rumah miskin tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Disinilah pentingnya adanya partisipasi dari masyarakat, karena masyarakat juga harus memberikan penilaian dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan program tersebut.

KESIMPULAN

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Silae dalam pelaksanaan program bedah rumah warga miskin di Kelurahan Silae dinilai masih rendah, hal ini berdasarkan pada tiga dari empat indikator partisipasi masyarakat yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dinilai masih belum maksimal, ketiga indikator tersebut adalah tahap assesment, tahap alternatif program atau kegiatan dan tahap evaluasi. Selain itu juga peneliti juga menemukan bahwa masyarakat di Kelurahan Silae lebih banyak berpartisipasi pada tahap pelaksanaan (implementasi) program bedah rumah miskin di kelurahan tersebut.

REFERENSI

- Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, M. S. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1–15.
- Alfian, M., Niswaty, R., Darwis, M., Arhas, S. H., & Salam, R. (2019). Motivasi Kerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Employee Motivation at the Secretariat of the Regional Representative Council of Gowa Regency. *Journal of Public Administration and Government*, 1, 44–54.
- Andika Rismayanti Hadi, Irwan Effendi, T. H. (2013). Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dan Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. *JIIA*, 1(1), 66–72.
- Daraba, H. D. (2017). Effect on The Level of Village Fund Program Community Participation in The North Galesong District Takalar Regency. *Sosiohumaniora*, 19(1), 52–58.
- Daswati, D., Samad, M. A., & Wekke, I. S. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Integrated Community Shelter Pasca Bencana Di Kota Palu Collaborative Governance in the management of Integrated Community Shelters post disaster (ICS) in the City of Palu.*
- Hidayat, R. (2020). *Journal of Public Administration and Government PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PKH DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR (STUDI DI KELURAHAN ATULA) Poverty Alleviation Through PKH Program in East Kolaka District (Study in Atula Village)*. 2(April), 44–53. <https://doi.org/10.22487/jpag.v2i1.38>
- Mahendra, P. B. P. (2017). Analisis Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Terhadap Produktifitas Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat. *International Journal of Social Science and Businnes*, 1(1), 1–13.
- Nugroho, W. A., Ft, R. S., & Surabaya, S. (2013). EFEKTIVITAS PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN BIDANG DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Teknik Sipil KERN*, 3(2), 79–84.
- Samosir, M. S. (2020). Journal of Public Administration and Government Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel , Restoran dan Hiburan Sikka Analysis of The Influence of Contribution and Effectiveness of Hotel Tax , Restaurant And Entertainment on Regional Ori. *Journal of Public Administration and Government P*, 2(April), 35–43. <https://doi.org/10.22487/jpag.v2i1.38>
- Sidiq, Ade Jafar, R. R. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 4(1), 1–140.
- Yunita, Herma, S. Y. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan pada Program PNPM. *Journal of Economic, Business, and Accounting*, 4(1), 1–9.